

BAB III

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN
KEBENCANAAN PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018**

Pada bab ini, akan dipaparkan hasil penelitian mengenai Evaluasi Program Pendidikan Kebencanaan Pada Sekolah Menengah di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018. Program tersebut bertujuan untuk memberikan dan meningkatkan pengetahuan akan kebencanaan bagi masyarakat terutama bagi generasi muda jenjang sekolah menengah di Kabupaten Banjarnegara khususnya, sehingga resiko bencana dapat diminimalisir. Program pendidikan kebencanaan merupakan inisiasi dari BPBD Kabupaten Banjarnegara yang kemudian bekerja sama dengan pihak Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dan PMI Kabupaten Banjarnegara.

Mengingat tingginya potensi bencana yang ada di Indonesia serta masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap penanggulangan dan kesiapsiagaan bencana, maka pemerintah melalui Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana memberikan mandat kepada seluruh kalangan untuk dapat bahu membahu dalam hal mengurangi dan meminimalisir resiko yang ditimbulkan akibat kejadian bencana, baik bencana alam maupun bencana kemanusiaan. Salah satu kebijakan yang terdapat dalam regulasi tersebut pada pasal 35 adalah terkait mitigasi bencana atau upaya pengurangan resiko bencana melalui pemberian pelatihan, pendidikan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Berangkat dari UU Nomor 24 Tahun 2007 tersebut, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara membuat Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah. Selanjutnya, pemerintah kabupaten melalui BPBD dan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara membuat sebuah program terkait pendidikan kebencanaan sebagai bentuk keprihatinan akan tingginya angka potensi bencana di lingkungan sekolah. Belum ada regulasi khusus yang menjadi dasar pelaksanaan program pendidikan kebencanaan di Kabupaten Banjarnegara. Kendati demikian, pendidikan kebencanaan diatur secara spesifik dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 93 Tahun 2017 tentang Muatan Lokal Kebencanaan yang diperuntukan bagi jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dalam regulasi tersebut diatur aktor yang menyelenggarakan mulok kebencanaan, penyusunan silabus dan materi apa saja yang akan disampaikan, mekanisme pelaksanaan, kerja sama antarpihak, dan aktor yang menyelenggarakan monitoring dan evaluasi mulok kebencanaan.

Evaluasi merupakan suatu bentuk penilaian dari perencanaan atau saat sebuah program sedang berlangsung guna menentukan relevansi, efektivitas, efisiensi, dampak serta keberlanjutan sebuah program tersebut. Tujuannya adalah untuk menggabungkan temuan-temuan yang ada ke dalam proses pengambilan keputusan. Peran evaluasi sebuah program memberikan penjelasan terkait pengalokasian sumber daya, mempermudah mengidentifikasi masalah yang muncul, membantu merefleksikan penyebab dari masalah yang terjadi, mendukung berbagai alternatif dalam hal pembuatan keputusan, dan lain

sebagainya. Evaluasi berguna untuk mempengaruhi pembuatan keputusan atau kebijakan. Pengaruh evaluasi terhadap pembuatan kebijakan dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya adanya perbedaan antara kinerja yang direncanakan dengan kinerja aktual. Informasi dari evaluasi menjadi begitu penting untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja yang direncanakan dengan kinerja aktual sehingga akan dilakukan pembuatan strategi baru yang dibutuhkan untuk menyelaraskan kinerja pada saat perencanaan dengan kinerja saat ini.

Evaluasi dapat membantu mengidentifikasi perbedaan antara perencanaan dan implementasi terhadap hasil baik dari segi kekuatan maupun kelemahan sebuah program. Evaluasi dapat membantu menganalisa sumber alokasi yang dapat berupa keuangan dan alokasi sumber daya manusia. Dindikpora dan BPBD Kabupaten Banjarnegara selalu melakukan evaluasi mulai dari perencanaan program maupun saat program sedang berlangsung. Evaluasi pelaksanaan program dapat dilakukan pada saat program tengah berjalan, atau disebut juga sebagai *process implementation assessment* seperti yang dikemukakan oleh Kusek (2004). Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk mengetahui alasan mengapa sebuah proses implementasi program tidak dapat berjalan dengan baik.

Penelitian ini didapatkan dari data primer dan sekunder, serta hasil yang diperoleh dilakukan melalui hasil wawancara dengan pihak terkait dengan pelaksanaan evaluasi program pendidikan kebencanaan serta melakukan pengamatan langsung di lapangan sehingga dapat mengetahui sejauh mana jalannya pelaksanaan program tersebut. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi

yang dipaparkan oleh Jody Zall Kusek dan Ray C. Rist dalam *handbook* yang berjudul *Ten Step to a Results-Based Monitoring and Evaluation System*. Bab ini akan membahas mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program dengan melakukan penilaian berdasarkan pada beberapa poin sebagai berikut:

- a. Relevansi Program Pendidikan Kebencanaan
- b. Efisiensi Program Pendidikan Kebencanaan
- c. Efektivitas Program Pendidikan Kebencanaan
- d. Dampak Program Pendidikan Kebencanaan
- e. Keberlanjutan Program Pendidikan Kebencanaan

3.1 Evaluasi Program Pendidikan Kebencanaan

3.1.1. Relevansi Program Pendidikan Kebencanaan

Relevansi memiliki arti sebagai sejauh mana tujuan dari sebuah program dapat berjalan dan terealisasi sesuai dengan apa yang telah disepakati sebelumnya antara pembuat kebijakan dan penerima manfaat, prioritas, dan kebutuhan program. Relevansi dapat dilihat melalui kesesuaian kebutuhan terhadap perencanaan dengan pelaksanaan program serta kesesuaian perencanaan dengan tujuan program.

1. Kesesuaian Kebutuhan terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pendidikan Kebencanaan

Setiap organisasi pasti memiliki kebutuhan yang ingin dipenuhi agar tujuan sebuah program/kegiatan dapat tercapai dengan baik. Dalam pelaksanaan program, kebutuhan tersebut

tentu harus memiliki keselarasan dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Kebutuhan tersebut dapat berupa kebutuhan fisik, finansial, maupun sumber daya manusia.

a. Kebutuhan Fisik

Kebutuhan fisik merupakan kebutuhan nyata yang diperlukan dan harus dipenuhi untuk menunjang jalannya sebuah program agar berjalan dengan baik dan lancar. Kebutuhan fisik dalam program pendidikan kebencanaan pada jenjang sekolah menengah yakni berupa kurikulum kebencanaan, buku mulok kebencanaan, dan pemasangan rambu-rambu kebencanaan.

1) Kurikulum Kebencanaan

Penyusunan kurikulum muatan lokal kebencanaan berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2017 tentang Muatan Lokal Kebencanaan. Penyusunan kurikulum tersebut dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara dengan melibatkan tenaga ahli atau peneliti di bidang kebencanaan, yakni Bapak Tuswadi yang juga berprofesi sebagai guru di salah satu SMA di Banjarnegara. Kurikulum tersebut disusun dengan mempertimbangkan potensi, karakteristik, dan kebutuhan daerah yang mencerminkan kekhasan dari daerah tersebut (hasil wawancara dengan Bapak Suhardi, S.Pd., M.M., Kasi

Kurikulum Bidang Sekolah Menengah Pertama Dindikpora Banjarnegara, 21 Januari 2019). Besarnya potensi bencana yang ada di Banjarnegara telah menjadi ciri khas dari daerah tersebut. Kurikulum tersebut diperuntukkan bagi jenjang SMP dan sudah didistribusikan kepada masing-masing SMP di wilayah Banjarnegara.

“kurikulum ini baru diterapkan di SMP saja. Untuk SMA/SMK/MA belum kami buat karena saat ini berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi” (hasil wawancara dengan Bapak Suhardi, S.Pd., M.M, Kasi Kurikulum Bidang Sekolah Menengah Pertama Dindikpora Banjarnegara, 21 Januari 2019)

Kurikulum kebencanaan yang diterapkan tersebut menggunakan jenis kurikulum terintegrasi (*integrated curriculum*). Muatan lokal biasanya merupakan bentuk kurikulum terpisah, namun Dindikpora Banjarnegara memilih untuk mengintegrasikannya ke dalam mata pelajaran sehingga tidak berdiri sendiri. Shoemaker (1989) menjelaskan kurikulum terintegrasi sebagai pendidikan yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga melewati garis-garis batas mata pelajaran, membawa bersama beragam kurikulum ke dalam asosiasi yang bermakna agar terfokus kepada bidang-bidang studi yang luas. Kurikulum pembelajaran terintegrasi dinilai lebih fleksibel diterapkan kimbang kurikulum terpisah. Kurikulum muatan lokal kebencanaan dipilih untuk

diintegrasikan ke dalam mata pelajaran maupun ekstrakurikuler agar waktu/jadwal pelajarannya lebih fleksibel karena masih kurangnya tenaga pendidik kebencanaan.

Bentuk pengintegrasian kurikulum kebencanaan ke dalam mata pelajaran yakni berupa pembuatan RPP, seperti IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan Olahraga, sedangkan pada ekstrakurikuler diintegrasikan ke dalam materi dan simulasi kebencanaan pada ekstrakurikuler pramuka dan PMR. Muatan materi mulok kebencanaan berdasarkan Perbup Banjarnegara Nomor 93 Tahun 2017 Pasal 5 mencakup:

1. Pengetahuan dasar kebencanaan
2. Penanggulangan bencana nasional
3. Kabupaten Banjarnegara rawan bencana
4. Mari mengenal longsor
5. Mari mengenal angin puting beliung
6. Mari mengenal bencana banjir
7. Mari mengenal kebakaran
8. Mari mengenal gempa bumi

Pada implementasinya, setiap guru dituntut menemukan materi kaitan materi pelajaran dengan bencana yang bisa diahami oleh peserta didik. Kendati demikian, materi kebencanaan telah diintegrasikan dalam Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) setiap mata pelajaran yang

memiliki keterkaitan dengan materi kebencanaan, salah satunya adalah mata pelajaran IPA dengan Kurikulum 2013. Pelaksanaan pembelajaran mapel IPA terintegrasi dilakukan melalui penyampaian materi dengan pendekatan *scientific* dan metode yang digunakan berupa diskusi dan eksperimen dengan model *discovery learning*. Proses belajar mengajar materi kebencanaan terintegrasi ini memanfaatkan buku mulok kebencanaan yang telah disusun oleh Dindikpora, BPBD, dan PMI Kabupaten Banjarnegara. Pengintegrasian pendidikan kebencanaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Pengintegrasian Materi Kebencanaan pada Mata Pelajaran IPA

Jenis Bencana Alam	Kelas/Sem.	SK dan KD	
Gempa bumi	VIII/2	SK 6 KD 6.1	Memahami konsep dan penerapan getaran, gelombang, dan optika dalam produk teknologi sehari-hari Mendeskripsikan konsep gempa bumi sebagai gejala gelombang serta parameternya
Tsunami	VIII/2	SK 6 KD 6.1	Memahami konsep penerapan getaran, gelombang, dan optika dalam produk teknologi sehari-hari Mendeskripsikan konsep tsunami sebagai gejala gelombang dan parameternya
Longsor	VIII/2	SK 1 KD 1.5	Memahami peranan usaha, gaya, dan energi dalam kehidupan sehari-hari Menjelaskan bencana alam pada peristiwa tanah longsor sebagai perubahan bentuk energi
Gunung api	VIII/2	SK 1 KD 1.5	Memahami peranan usaha, gaya, dan energi dalam kehidupan sehari-hari Menjelaskan bencana alam pada peristiwa gunung api sebagai

			perubahan bentuk energi
--	--	--	-------------------------

Sumber: RPP MGMP IPA SMP Kabupaten Banjarnegara, 2018.

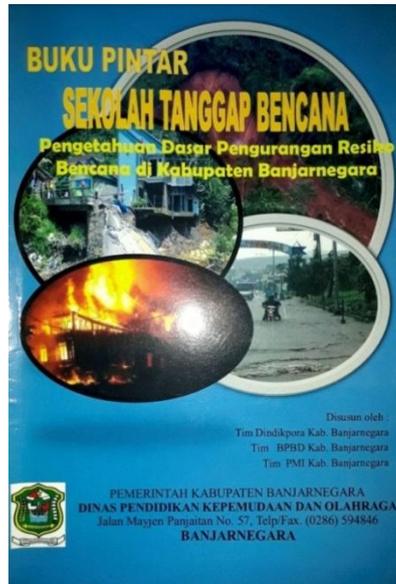
Pelaksanaan kurikulum kebencanaan di sekolah bukan hanya berupa materi ataupun teori akan tetapi juga berupa praktek simulasi kebencanaan agar siswa lebih memahami materi yang disampaikan sehingga dapat selalu terngiang di otak siswa, selain itu juga dapat melihat sejauh mana kemampuan siswa dalam menyerap materi yang disampaikan oleh guru. Integrasi kurikulum kebencanaan di SMP dalam setiap kegiatan sekolah akan semakin mengasah pengetahuan dan keterampilan tangguh bencana bagi seluruh elemen sekolah, tak terkecuali peserta didik. Apabila sudah demikian, maka pencegahan dan kesiapsiagaan akan dapat diwujudkan melalui sekolah, yang pada akhirnya akan meminimalisir dampak bencana berupa korban jiwa dan harta benda dalam setiap kejadian bencana. Manusia tidak dapat memprediksi datahnya bencana, namun manusia dapat mencegah terjadinya bencana alam yang memakan banyak korban dengan pendidikan kebencanaan sejak dini.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kurikulum kebencanaan ini belum dilaksanakan oleh semua sekolah yang ada di wilayah Banjarnegara.

2) Buku Mulok Kebencanaan

Guna menunjang pelaksanaan kurikulum muatan lokal kebencanaan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara juga menyusun buku kebencanaan, yang kemudian dinamai *Buku Pintar Sekolah Tangguh Bencana: Pengetahuan Dasar Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Banjarnegara*. Penyusunan buku pintar kebencanaan dilakukan pada tahun 2017 yang diperuntukkan bagi SMP. Penyusunan buku tersebut dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjarnegara dengan menggandeng Dindikpora dan PMI Kabupaten Banjarnegara serta dibantu oleh beberapa pihak penggiat kebencanaan di sekitar wilayah Kabupaten Banjarnegara. Buku tersebut merupakan buku pertama yang disusun oleh BPBD Banjarnegara. Berikut penampakan buku mulok kebencanaan untuk jejang SMP:

Gambar 3.1
Buku Pintar Sekolah Tanggap Bencana untuk Jenjang SMP



Sumber: Dokumen Pribadi

Buku mulok kebencanaan hanya baru ditujukan untuk jenjang SMP sesuai amanat Perbup Banjarnegara Nomor 93 Tahun 2017. Penyusunan buku pintar kebencanaan bagi SMP disesuaikan dengan keadaan dan potensi bencana yang ada di sekitar wilayah Banjarnegara. Buku pintar tersebut berisi materi kebencanaan, seperti pengetahuan dasar kebencanaan, penanggulangan bencana nasional, Banjarnegara: kabupaten rawan bencana, serta pengenalan mengenai bencana tanah longsor, kebakaran dan gempa bumi. Buku tersebut selanjutnya didistribusikan ke seluruh sekolah jenjang Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Banjarnegara. Penyusunan dan pendistribusian buku pintar kebencanaan masih terbatas mengingat terkendala anggaran yang juga

terbatas. Pendistribusian buku dilakukan langsung oleh Dindikpora Banjarnegara yang selanjutnya diserahkan kepada setiap SMP yang ada di Banjarnegara.

Buku mulok kebencanaan tersebut tidak bersifat wajib bagi SMP di wilayah Banjarnegara karena hanya sebatas penunjang fasilitas belajar mengajar. Dindikpora mengatakan bahwa buku tersebut tidak bersifat wajib karena muatan lokal kebencanaan sendiri belum berdiri sendiri seperti mulok yang lain, misalnya mulok dawet ayu. Penggunaan buku tersebut belum maksimal, selain karena SMP yang ada di Banjarnegara sebagian besar SMP merupakan Sekolah Adiwiyata (*Green School*) yang mana lebih fokus kepada kepedulian terhadap lingkungan dan pertamanan sehingga buku mulok kebencanaan dianggap kurang relevan dan efektif untuk digunakan. Di samping itu, juga karena belum meratanya pendistribusian buku mulok kebencanaan, hal ini dibuktikan dengan belum semua SMP mendapatkan buku tersebut. 2 dari 4 SMP di wilayah atas Banjarnegara yang merupakan daerah rawan bencana, mengatakan bahwa mereka belum mendapatkan buku mulok kebencanaan hingga saat ini. Pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan oleh pihak Dindikpora. Pihaknya mengatakan bahwa pendistribusian buku telah dilakukan di seluruh SMP.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa buku muatan lokal kebencanaan hanya disusun dan didistribusikan untuk jenjang SMP, serta buku tersebut tidak bersifat wajib karena muatan lokal kebencanaan sendiri belum berdiri sendiri seperti halnya mulok-mulok lain yang sudah lebih dulu dibuat dilaksanakan.

3) Pemasangan Rambu Kebencanaan

Rambu-rambu kebencanaan sangat penting di pasang di sekitar sekolah. Berangkat dari rasa keprihatinan dan kepedulian BPBD Banjarnegara mengingat hampir seluruh sekolah belum tepasang rambu jalur evakuasi maupun titik kumpul. Setelah adanya program pendidikan kebencanaan berupa mulok kebencanaan bagi SMP, barulah rambu-rambu tersebut dipasang di tiap sudut sekolah. Pemasangan rambu ini memudahkan untuk proses evakuasi bagi seluruh warga sekolah apabila terjadi bencana di sekolah tersebut.

Adapun pemasangan rambu jalur evakuasi dan titik kumpul yang dilaksanakan di SMP, dilakukan secara mandiri dalam arti memfasilitasi sendiri tanpa adanya pemberian sarana dan prasarana dari BPBD Banjarnegara. Pihak sekolah memasang rambu tersebut berdasarkan instruksi langsung dari BPBD Banjarnegara, kemudian sekolah mencetak rambu jalur evakuasi sendiri dan memasangnya di beberapa sudut

sekolah. Hasil observasi yang di lapangan menunjukkan bahwa dari 4 lokasi SMP yang sudah dikunjungi, terdapat 2 sekolah dengan rambu jalur evakuasi dan titik kumpul belum terpasang, yakni SMP Negeri 1 Wanayasa dan SMP Ma'arif NU 01 Karangobar. Di samping itu, meski rambu jalur evakuasi yang terdapat di SMP Negeri 1 Batur sudah terpasang, namun beberapa diantaranya terlepas akibat adanya angin kencang pada bulan Januari 2019 lalu. Berikut penampakan rambu jalur evakuasi yang terpasang di sekolah-sekolah:

Gambar 3.2
Rambu Jalur Evakuasi di SMP Negeri 1 Karangobar



Sumber: Dokumen Pribadi, 2019.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, rambu titik kumpul belum terpasang pada ke-empat SMP tersebut. Akan tetapi, pihak sekolah mengatakan bahwa titik kumpul berada di lapangan

sekolah karena lokasinya terbuka dan jauh dari bangunan maupun gedung tinggi.

“untuk titik kumpulnya berada di lapangan mbak tapi rambu titik kumpulnya belum di pasang.” (hasil wawancara dengan Bapak Sutrimo, S.Pd., Guru SMP Negeri 1 Karangkoar, 24 Januari 2019)

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa rambu jalur evakuasi telah terpasang di setiap SMP dan dilaksanakan sendiri secara mandiri tanpa adanya fasilitas yang diberikan oleh Dindikpora maupun BPBD Banjarnegara, sedangkan untuk rambu titik kumpul belum terpasang. Karena pemasangannya hanya menggunakan alat dan bahan yang sederhana, yakni hanya berupa *print-out* gambar jalur evakuasi, maka banyak diantaranya yang sudah terlepas akibat angin kencang.

b. Kebutuhan Finansial

Berbicara mengenai dana merupakan salah satu hal yang wajib diketahui oleh sebagian orang karena sebuah program tidak akan berjalan dengan lancar apabila tidak ditunjang dengan finansial yang memadai. Hal ini juga berlaku pada program pendidikan kebencanaan yang diimplementasikan pada jenjang sekolah menengah di Kabupaten Banjarnegara. Biaya yang dipakai dalam penyelenggaraan program ini berasal dari APBD. Pengelolaan anggaran program tersebut berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan dan Kepemudaan Kabupaten Banjarnegara. Tidak ada perincian

khusus terkait penganggaran program pendidikan kebencanaan pada sekolah menengah ini karena pihak Dindikpora menolak memberikan keterangan lengkap.

Biaya yang dianggarkan pada program ini sebesar Rp. 100.000.000,-. Dana tersebut digunakan untuk proses penyusunan kurikulum dan buku mulok kebencanaan, percetakan dan pendistribusian buku, serta untuk biaya bintek dan diklat bagi guru SMP. Anggaran tersebut masih dianggap kurang mengingat banyak kebutuhan yang belum terpenuhi, seperti percetakan buku mulok kebencanaan yang hingga kini masih di cetak dalam jumlah yang terbatas. Masing-masing SMP hanya menerima 11 buah buku mulok kebencanaan dan jumlah SMP yang ada di wilayah Banjarnegara adalah 98 sekolah yang berarti buku yang telah dicetak berjumlah 1078 eksemplar, sedangkan masing-masing sekolah memiliki rerata siswa berjumlah 230 siswa. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah buku yang diterima tidak sebanding dengan jumlah peserta didik di sekolah.

Dapat diambil kesimpulan bahwa anggaran untuk program pendidikan kebencanaan sungguh terbatas mengingat kegiatan yang dilaksanakan banyak. Dapat dikatakan bahwa anggaran yang ada tidak mencukupi seluruh kegiatan yang ada, sebagai contoh pencetakan buku mulok kebencanaan. Buku tersebut

baru di cetak sejumlah 11 buku per SMP yang ada di Banjarnegara. Dapat dilihat bahwa belum ada perencanaan yang matang terkait pemenuhan kebutuhan finansial program pendidikan kebencanaan.

c. Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Kebutuhan sumber daya manusia merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan ketersediaan sumberdaya manusia serta intensitas informasi yang dibutuhkan dalam membuat keputusan. Mengenai sumber daya manusia di sini memiliki arti bagaimana keterlibatan seseorang dalam mendukung jalannya program tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung agar tujuan program yang telah ditentukan sebelumnya dapat tercapai. Dalam hal program pendidikan kebencanaan, aktor yang terlibat yakni BPBD, Dindikpora, dan sekolah. BPBD Banjarnegara memiliki 33 SDM yang terdiri dari 29 laki-laki dan 4 perempuan guna mendukung jalannya tupoksi organisasi. Ketersediaan SDM di BPBD Banjarnegara terbagi menjadi 3 kategori berdasarkan tingkat pendidikan, yakni SMP yang terdiri dari 4 orang, SMA sebanyak 20 orang, dan Sarjana sebanyak 9 orang. Bidang yang menangani program pendidikan kebencanaan adalah bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. Bidang ini relevan dengan program pendidikan kebencanaan mengingat bidang ini

bergerak dalam program-program mitigasi bencana, salah satunya dengan mengadakan pendidikan kebencanaan di sekolah-sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara, kualitas sumber daya manusia, khususnya BPBD, secara umum sangat baik, namun kuantitasnya masih terbatas karena belum sesuai dengan bobot nilai rawan bencana. Oleh karena itu, BPBD membentuk relawan-relawan baru untuk membantu memenuhi kebutuhan SDM yang ada. Selanjutnya, sarana dan prasarana guna menunjang penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dimiliki oleh BPBD Banjarnegara telah terpenuhi dan digunakan dengan semaksimal mungkin. Dalam hal ini, pihak BPBD bekerja sama dengan DPU, Dinsos, PMI, Basarnas maupun SAR-Kab untuk memenuhi sarana dan prasarana yang dirasa masih kurang memadai. Kerja sama tersebut bukan hanya berupa prasarana, namun juga sarananya seperti ketika BPBD akan melakukan sosialisasi maupun simulasi, maka PMI atau Dinsos akan bersedia membantu memfasilitasi dan sebaliknya. Selain itu, BPBD Kabupaten Banjarnegara juga sempat bekerja sama dengan Badan Geologi Bandung untuk melakukan sosialisasi kebencanaan di 5 SMP yang ada di Banjarnegara.

“ada 5 sekolah yang didatangi oleh Tim Badan Geologi Bandung untuk dilakukan sosialisasi tentang

pengurangan resiko bencana di wilayah rawan longsor. Sekolah-sekolah tersebut berada di wilayah Punggelan, Pejawaran, Wanayasa, Kalibening, dan Wanadadi” (hasil wawancara dengan Bapak Andri Sulisty, SOR, Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Banjarnegara, 21 Januari 2019)

Dari jumlah pegawai yang berada di BPBD Banjarnegara, hanya beberapa orang saja yang ikut serta sebagai fasilitator/narasumber sosialisasi atau pelatihan, diantaranya adalah Bapak Drs. Arief Rahman, S.T., M.Si (Kepala Pelaksana BPBD) dan Bapak Andri Sulisty, SOR (Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan), serta beberapa staf dari BPBD Banjarnegara.

Sumber daya aparatur pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara, terdata berjumlah 6.683 orang yang terdiri dari pejabat struktural sejumlah 126 orang, pejabat fungsional tertentu sebanyak 6.047 orang, dan pejabat fungsional umum berjumlah 510 orang. Sumber daya aparatur Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara yang bertanggungjawab dalam pendidikan kebencanaan bagi jenjang sekolah menengah pertama berada di bawah tanggung jawab Seksi Kurikulum Bidang Sekolah Menengah Pertama. Jumlah pegawai pada Bidang Sekolah Menengah Pertama adalah 15 orang yang terdiri dari 8 orang pegawai Seksi Kurikulum Bidang Sekolah Menengah Pertama dan 7 orang pengawas

SMP. Seksi Kurikulum Bidang Sekolah Menengah Pertama ini memiliki kewenangan dalam penyusunan kurikulum dan buku muatan lokal kebencanaan.

Kualitas dan kuantitas dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara sudah baik, akan tetapi yang menjadi kendala adalah belum tersedianya tenaga pendidik kebencanaan secara khusus pada Dindikpora Banjarnegara. Ketidakterediaan tenaga pendidik kebencanaan dan terbatasnya personel BPBD Banjarnegara, membuat pendidikan kebencanaan di sekolah menjadi kurang maksimal. Selain tidak mudahnya membuat dan menerapkan sebuah kurikulum, dalam hal ini kurikulum kebencanaan, faktor ketersediaan SDM pun menjadi salah satu kendala. Sebuah program tidak akan berjalan dengan baik apabila SDM yang tersedia tidak memadai. Hal ini juga tengah dirasakan oleh Dindikpora dan BPBD Banjarnegara dalam pelaksanaan program pendidikan kebencanaan di sekolah menengah.

Sumber daya manusia dari BPBD Kabupaten Banjarnegara berasal dari organisasi kemanusiaan dan relawan bencana. Setiap personel BPBD harus memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidang kebencanaan. Kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana membutuhkan tenaga teknis lapangan yang mempunyai

keahlian khusus dalam penanggulangan bencana. Berbeda dengan BPBD yang merupakan orang lapangan, Dindikpora Kabupaten Banjarnegara belum memiliki sumber daya yang ahli di bidang kebencanaan akan tetapi memiliki konsultan kebencanaan, yakni Bapak Tuswadi yang merupakan guru sekaligus peneliti bidang kebencanaan. Agar tetap menjaga dan meningkatkan kapasitas SDM, BPBD Kabupaten Banjarnegara kerap mengirimkan personelnnya untuk mengikuti pelatihan dan pembinaan kebencanaan baik tingkat provinsi maupun nasional.

Gambar 3.3
Pembinaan dan Pelatihan Personel BPBD



Sumber: Dokumentasi BPBD Banjarnegara

Berdasarkan diskusi di atas, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pendidikan kebencanaan di SMP belum cukup memadai. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Andri selaku Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Banjarnegara yang mengatakan BPBD masih kewalahan dalam menanggapi permintaan baik

sosialisasi, pelatihan maupun pendampingan kebencanaan di sekolah-sekolah mengingat minimnya personel yang ada dan waktu yang terbatas. Dalam kurun waktu 2 tahun saja, BPBD belum menyelesaikan target sosialisasi dengan baik, dibuktikan dengan persentase sosialisasi yang telah dilaksanakan baru sebesar 10%. Dindikpora dan sekolah pun tidak dapat berbuat banyak mengingat mereka bukan berasal dari bidang kebencanaan, sehingga hanya mengandalkan BPBD saja (hasil wawancara dengan Bapak Andri Sulisty, SOR, Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Banjarnegara, 21 Januari 2019).

2. Kesesuaian Perencanaan dengan Tujuan Program Pendidikan Kebencanaan

Penyusunan rencana program tentu tidak terlepas dari tujuan program yang telah ditentukan guna mengarahkan keinginan yang akan ingin dicapai. Perencanaan program pendidikan kebencanaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan tingginya potensi bencana di Banjarnegara. Sehingga pada akhirnya tercetuslah keputusan pembuatan program pendidikan kebencanaan di SMP. Perencanaan program tersebut diawali dengan mengumpulkan data terkait kebencanaan seperti penyusunan peta resiko bencana, pembuatan zonasi sekolah rawan bencana, serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti akademisi yang ahli di

bidang kebencanaan, seperti penggiat kebencanaan, BPBD dan PMI Kabupaten Banjarnegara.

Tabel 3.2
Perbandingan Perencanaan dan Pelaksanaan

No.	Perencanaan	Pelaksanaan
1.	Penyusunan kurikulum kebencanaan untuk jenjang SMP	Kurikulum kebencanaan telah diterapkan di beberapa sekolah. 3 dari 4 sekolah telah mengimplementasikan kurikulum kebencanaan melalui pengintegrasian materi ke dalam mata pelajaran dan ekstrakurikuler
2.	Penyusunan buku muatan lokal kebencanaan	Berdasarkan data dari pihak Dindikpora Banjarnegara terkait pendistribusian buku mulok, buku tersebut telah disusun dan didistribusikan ke sekolah-sekolah, namun 2 dari 4 SMP belum menerima buku tersebut
4.	Pemasangan rambu kebencanaan	2 dari 4 sekolah menengah pertama telah memasang rambu kebencanaan berupa rambu jalur evakuasi di tiap sudut sekolah meski ala kadarnya. Rambu titik kumpul belum terpasang.
5.	Penyelenggaraan workshop/diklat buku kebencanaan bagi guru SMP	Seluruh guru SMP telah mengikuti penyelenggaraan workshop dan diklat terkait kebencanaan yang diselenggarakan oleh Dindikpora, BPBD, dan PMI Banjarnegara Workshop dan diklat diadakan pada tanggal 11-13 Juli 2018
6.	Penyelenggaraan seminar kebencanaan untuk umum	2 dari 4 Kepala SMP mengikuti penyelenggaraan seminar kebencanaan "Sekolah Sungai" di

		Politeknik Banjarnegara pada tanggal 10 Oktober 2018
7.	Penyelenggaraan sosialisasi pendidikan kebencanaan di setiap sekolah	Sejak 2 tahun terakhir, sosialisasi pendidikan kebencanaan baru terlaksana 10% dari semua SMP yang ada di wilayah Banjarnegara

Sumber: data diolah peneliti

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andri Sulisty, SOR selaku Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Banjarnegara, penyusunan program pendidikan kebencanaan dilatar-belakangi oleh masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat Banjarnegara akan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. Sebagian besar masyarakat masih bersikap acuh terhadap bencana, hal ini dibuktikan dengan salah satu kasus bencana tanah longsor yang terjadi di Dusun Jemblung, Kecamatan Karangobar akhir tahun 2014 silam. Tanda-tanda akan terjadinya longsor telah jelas terlihat dan beberapa warga menyadari itu, namun mereka memilih bersikap masa bodoh sehingga ketika bencana terjadi kerugian material dan korban jiwa tidak dapat dihindarkan. Bahkan, hingga saat ini masih terdapat 125 korban jiwa yang belum ditemukan.

Tujuan dari program pendidikan kebencanaan adalah untuk memberikan bekal pengetahuan terkait kebencanaan dan kesiapsiagaan bencana bagi pendidik dan peserta didik. Tujuan pendidikan kebencanaan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Banjarnegara dan Renstra BPBD Kabupaten Banjarnegara Tahun

2017-2022. Dunia pendidikan menjadi agen yang sangat ideal untuk menyebarkan pengetahuan tentang kebencanaan, baik bagi individu, kelompok, maupun masyarakat luas. Sektor pendidikan merupakan sebuah perantara yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat. Masyarakat dalam hal ini, keluarga, akan memiliki rasa kepercayaan yang tinggi terhadap guru maupun sekolah terutama kepada siswa (anak) dibandingkan dengan orang lain karena mereka bertemu secara langsung setiap hari serta mempunyai ikatan emosional yang tinggi terhadap anaknya.

Apabila sang anak sudah memiliki bekal pengetahuan mengenai bencana, maka keluarga tidak segan untuk mempercayai informasi yang dikatakan oleh anak tersebut sehingga apabila akan terjadi bencana maka akan dengan mudah dilakukan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, terutama dalam hal evakuasi mandiri. Pengetahuan mengenai kesiapsiagaan bencana menjadi sangat penting untuk selalu ditekankan kepada masyarakat terutama peserta didik mengingat *mindset* masyarakat terhadap bencana masih salah. Dewasa ini, masyarakat masih acuh terhadap pentingnya pendidikan kebencanaan bagi diri mereka sendiri ketika menghadapi suatu bencana. Pola pikir yang salah tersebut membuat banyaknya korban jiwa dan kerugian finansial ketika bencana melanda. Hal inilah yang menjadi dasar dibuatnya

program pendidikan kebencanaan dengan harapan dapat membuka kesadaran masyarakat akan pentingnya bekal pengetahuan kebencanaan sehingga resiko bencana dapat diminimalisir.

Dapat disimpulkan bahwa, perencanaan program pendidikan kebencanaan bagi sekolah menengah di Banjarnegara telah sesuai dengan tujuan program tersebut. Seperti halnya yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022, yakni meningkatkan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana yang kemudian diterjemahkan oleh Dindikpora dan BPBD Banjarnegara dengan membuat program pendidikan kebencanaan bagi SMP sebagai upaya pengurangan resiko bencana di sekolah. Tujuan dari pembelajaran pendidikan kebencanaan baik bagi SMP yaitu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa terhadap kebencanaan sejak dini sehingga mampu membantu proses penyelamatan dan kesiagaan dalam menghadapi bencana. Hal ini dibuktikan dengan semakin pedulinya siswa SMP terhadap bencana dengan mengikuti setiap kegiatan dari BPBD Banjarnegara. peserta didik SMP juga terlibat langsung dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Banjarnegara, seperti aktif membantu proses evakuasi bencana, menghibur masyarakat korban bencana (*trauma healing*), dan aktif dalam sekolah sungai. Siswa SMP di wilayah Banjarnegara juga selalu

melakukan kegiatan penggalangan dana setiap terjadi bencana baik di dalam maupun luar daerah.

3.1.2. Efisiensi Program Pendidikan Kebencanaan

Efisiensi merupakan suatu usaha yang dilakukan dalam upaya mencapai keberhasilan sebuah program dengan penggunaan sumberdaya secara optimal. Efisiensi memiliki makna melaksanakan dan menghasilkan segala sesuatu dengan tepat. Keefisienan sebuah program menjadi perhatian dan pertimbangan pemerintah. Efisiensi sebuah program dilihat dari ketepatan pengelolaan waktu, penggunaan biaya yang minim akan tetapi berdampak besar dalam perkembangan kemajuan program pendidikan kebencanaan, serta Sumberdaya Manusia yang memadai dan mumpuni. Efisiensi program dapat diukur dari ketepatan pengelolaan waktu, ketepatan pengelolaan biaya dan adanya SDM yang memadai guna menyukseskan jalannya program.

1. Ketersediaan SDM sebagai Penanggungjawab Program Pendidikan Kebencanaan

Sebuah program perlu memiliki penanggungjawab agar pelaksanaan program tersebut dapat terkontrol dan berjalan dengan baik dan semestinya. Dari hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari peraturan bupati, program pendidikan kebencanaan bagi jenjang SMP yang berupa muatan lokal kebencanaan berada di bawah tanggung jawab Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara yang secara

spesifik dibawah oleh Bapak Suhardi, S,Pd., M.M selaku Kepala Seksi Kurikulum Bidang Sekolah Menengah Pertama. Seksi Kurikulum Bidang Sekolah Menengah Pertama bertanggung jawab dalam penyusunan kurikulum dan buku muatan lokal kebencanaan untuk jenjang SMP. Dalam penyusunannya, Dindikpora bekerja sama dengan BPBD dan PMI Kabupaten Banjarnegara. Kemudian, pelaksanaan mulok kebencanaan di lapangan diserahkan kepada masing-masing SMP di wilayah Banjarnegara. Dalam hal ini, kepala sekolah selaku pimpinan sekolah berperan sebagai penanggungjawab program. Kendati demikian, hingga kini belum ada supervisi resmi yang dilakukan oleh Dindikpora bagi SMP-SMP terutama sekolah yang berada di daerah atas yang juga termasuk zona rawan bencana. Hanya beberapa sekolah yang berada di wilayah kota yang telah dilaksanakan supervisi oleh Dindikpora, akan tetapi hanya sebatas menanyakan perkembangan pelaksanaan mulok secara lisan tanpa adanya laporan resmi yang tertulis.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa terlepas dari adanya penanggung jawab program yang telah dipaparkan di atas, dapat dilihat bahwa belum ada jalur koordinasi yang jelas terkait pertanggung jawaban program pendidikan kebencanaan baik bagi jenjang SMP. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya laporan

pertanggung jawaban secara tertulis dan tidak adanya supervisi pelaksanaan program pendidikan kebencanaan di SMP.

2. Ketersediaan Anggaran Program Pendidikan Kebencanaan

Sebuah program dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila ada dukungan biaya atau anggaran. Biaya yang digunakan dalam pelaksanaan program pendidikan kebencanaan bagi SMP berasal dari APBD, namun anggaran tersebut masih terbatas. Biaya program pendidikan kebencanaan bagi SMP ini dianggarkan oleh Dindikpora Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp. 100.000.000,-. Ketersediaan anggaran tersebut telah dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat), bimbingan teknis (bintek), serta untuk biaya percetakan buku kebencanaan. Anggaran tersebut berasal dari APBD Kabupaten Banjarnegara yang kemudian dilimpahkan langsung ke Dindikpora Kabupaten Banjarnegara. Pihak Dindikpora Kabupaten Banjarnegara menjelaskan bahwa:

“Sumber dana program pendidikan kebencanaan berasal dari APBD senilai Rp. 100.000.000,-. Biaya yang dianggarkan pada saat perencanaan dengan pelaksanaan dapat dikatakan sesuai, hanya saja kami menggunakan sistem lelang sehingga biaya yang dikeluarkan lebih sedikit” (Hasil wawancara dengan Staf Bidang Kurikulum Dindikpora Kabupaten Banjarnegara, Bapak Yulian Hasto, S.Pd., Januari 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program pendidikan kebencanaan ini dana yang digunakan berasal dari alokasi dana APBD Kabupaten Banjarnegara. Tentu hal ini sangat

menguntungkan bagi sekolah-sekolah sehingga dapat meringankan beban anggaran sekolah, namun karena keterbatasan anggaran maka kaitannya dengan pengadaan buku juga bersifat terbatas. Kalau boleh mengusulkan, agar tidak menambah beban APBD, maka Dindikpora bisa mengusakahan sumber dana dari pihak lain, misalnya dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari perusahaan swasta atau kerja sama dengan lembaga lain yang bergerak di bidang kebencanaan yang ada di dalam maupun di luar wilayah Banjarnegara.

3. Kesesuaian Waktu Pelaksanaan Program Pendidikan

Dari hasil wawancara, program pendidikan kebencanaan telah direncanakan sejak tahun 2017. Namun, baru resmi diimplementasikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama mulai awal tahun ajaran baru 2018/2019, dalam pelaksanaannya sendiri baru berjalan 7 bulan sejak program ini diluncurkan. Program pendidikan kebencanaan bagi jenjang SMP ini diimplementasikan dalam bentuk muatan lokal kebencanaan sesuai dengan Perbup Banjarnegara Nomor 93 Tahun 2017 tentang Muatan Lokal Kebencanaan.

Secara keseluruhan, BPBD Banjarnegara menjelaskan bahwa program pendidikan kebencanaan ini telah diselenggarakan sejak dini, baik dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA/SMK, hingga perguruan tinggi. Pelaksanaan program pendidikan baik bagi SMP

dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun dan akan terus berlanjut. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banjarnegara dan Renstra BPBD Banjarnegara tahun 2017-2022. Jadi, hingga kini pelaksanaan program pendidikan kebencanaan untuk jenjang sekolah menengah telah berjalan selama hampir 2 tahun. Salah satu kegiatan pendidikan kebencanaan yang dilakukan berupa pelaksanaan workshop dan dilkat bagi guru SMP yang dilaksanakan pada tanggal 11-13 Juli 2018 lalu.

Pelaksanaan implementasi program pendidikan pada jenjang SMP berupa muatan lokal kebencanaan yang terintegrasi dalam kurikulum sekolah. Sebagian sekolah sudah mengintegrasikan materi kebencanaan pada RPP dan beberapa mata pelajaran seperti, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan Olahraga. Selain itu juga dimasukkan ke dalam ekstrakurikuler. Hingga kini program tersebut masih terus berjalan.

Dalam pelaksanaannya, muatan lokal kebencanaan bukanlah mata pelajaran khusus sehingga waktu pelaksanaannya tidak terjadwal dan menyesuaikan bahasan materi dari mata pelajaran. Akan tetapi, hal ini justru tidak efisien karena menjadikan siswa mudah lupa akan materi kebencanaan yang telah dipelajari sebelumnya.

Dapat ditarik kesimpulan, pelaksanaan program pendidikan kebencanaan bagi sekolah menengah memiliki jangka waktu 5

tahun sesuai dengan RPJMD Kabupaten Banjarnegara dan Renstra BPBD Banjarnegara tahun 2017-2022. Berdasarkan waktu pelaksanaannya, program tersebut dapat dikatakan kurang efisien mengingat pelaksanaannya hanya dilakukan dengan menyesuaikan materi pelajaran yang memiliki keterkaitan dengan kebencanaan. Namun, pelaksanaan program ini akan terus berlanjut mengingat potensi ancaman bencana di Banjarnegara cukup tinggi dan bencana tidak dapat diprediksi sehingga bekal pengetahuan akan kebencanaan harus selalu ditanamkan sejak dini dan kontinu.

3.1.3 Efektivitas Program Pendidikan Kebencanaan

Selanjutnya, efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target baik kualitas maupun kuantitas program yang telah dicapai dengan target awal yang sebelumnya telah ditentukan terlebih dahulu. Efektivitas merupakan hal pokok yang digunakan untuk mencapai tujuan ataupun sasaran yang telah ditentukan oleh stakeholder dalam sebuah program. Mengingat pentingnya sebuah program yang tepat sasaran serta berdaya guna, efektivitas sebuah program juga menjadi pertimbangan dan perhatian pemerintah. Dikatakan efektif apabila tujuan maupun sasaran program sudah sesuai dengan apa yang diinginkan. Program pendidikan kebencanaan efektif diterapkan di seluruh sekolah di Kabupaten Banjarnegara, terlebih bagi sekolah yang berada di zona rawan bencana. Efektivitas program pendidikan

kebencanaan dapat dilihat dari 1) ketersediaan buku muatan lokal kebencanaan, 2) terlaksananya workshop dan pelatihan kebencanaan, dan 3) tercapainya tujuan program pendidikan kebencanaan.

1. Tersedianya Buku Pintar Muatan Lokal Kebencanaan

Pendistribusian buku dilakukan langsung oleh Dindikpora Banjarnegara yang selanjutnya diserahkan kepada setiap SMP yang ada di Banjarnegara. Buku muatan kebencanaan tersebut tidak bersifat wajib bagi SMP di wilayah Banjarnegara karena hanya sebatas penunjang fasilitas belajar mengajar. Dindikpora mengatakan bahwa buku tersebut tidak bersifat wajib karena muatan lokal kebencanaan sendiri belum berdiri sendiri seperti muatan yang lain, misalnya muatan dawet ayu. Penggunaan buku tersebut belum maksimal, selain karena SMP yang ada di Banjarnegara sebagian besar SMP merupakan Sekolah Adiwiyata (*Green School*) yang mana lebih fokus kepada kepedulian terhadap lingkungan dan pertamanan sehingga buku muatan kebencanaan dianggap kurang relevan dan efektif untuk digunakan. Di samping itu, juga karena belum meratanya pendistribusian buku muatan kebencanaan, hal ini dibuktikan dengan belum semua SMP mendapatkan buku tersebut. Berdasarkan hasil observasi di ke-empat SMP yakni, SMP Ma'arif NU 01 Karangobar pada hari Senin, 14 Januari 2019,

SMP Negeri 1 Wanayasa pada Selasa, 15 Januari 2019, SMP Negeri 1 Karangobar pada hari Kamis, 17 Januari 2019, dan SMP Negeri 1 Batur pada Rabu, 23 Januari 2019, 2 dari 4 SMP di wilayah atas Banjarnegara yang merupakan daerah rawan bencana yang mengatakan bahwa mereka belum mendapatkan buku mulok kebencanaan hingga saat ini. Sekolah tersebut adalah SMP Ma'arif NU 01 Karangobar dan SMP Negeri 1 Karangobar. Pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan oleh pihak Dindikpora. Pihaknya mengatakan bahwa pendistribusian buku telah dilakukan di seluruh SMP. Data serah terima buku mulok bagi jenjang SMP dapat dilihat pada lampiran 2.

Gambar 3.4 **Daftar Isi Buku Pintar Sekolah Tanggap Bencana untuk** **Jenjang SMP**

DAFTAR ISI	
Pengantar dari Bupati Banjarnegara	ii
Pengantar dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjarnegara	iii
Pengantar dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kepemudaan Kabupaten Banjarnegara	iv
Bab 1	
Pengetahuan Dasar Kebencanaan	1
Bab 2	
Penanggulangan Bencana Nasional	
Bab 3	
Banjarnegara, Kabupaten Rawan Bencana	
Bab 4	
Mari Menenal Longsor	
Bab 5	
Mari Menenal Angin Puting Beliung	
Bab 6	
Mari Menenal Bencana Banjir	
Bab 7	
Mari Menenal Kebakaran	
Bab 8	
Mari Menenal Gempa Bumi	
Daftar Pustaka	
Tentang Anggota Tim Penulis Buku	

Sumber: Buku Pintar Sekolah Tangguh Bencana, 2017

Mengingat terbatasnya jumlah buku mulok kebencanaan yang diterima oleh masing-masing sekolah dan banyaknya beban materi pelajaran pada kurikulum saat ini, maka buku tersebut kurang dapat menunjang pelaksanaan pendidikan kebencanaan secara maksimal. Berdasarkan hasil wawancara, buku ini hanya dijadikan sebagai pegangan guru dan tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin. Buku ini hanya digunakan pada saat guru tengah membahas materi yang memiliki keterkaitan dengan kebencanaan sehingga buku ini tidak digunakan setiap saat melainkan hanya digunakan pada waktu tertentu.

Untuk itu, berdasarkan hasil diskusi di atas, dapat disimpulkan bahwa buku mulok kebencanaan di SMP sudah tersedia, dan beberapa sudah didistribusikan ke masing-masing sekolah. Akan tetapi dalam hal penggunaan, buku tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal karena hanya digunakan pada saat pembahasasan materi pelajaran yang terdapat materi berkaitan dengan bencana mengingat mulok kebencanaan ini tidak berdiri sendiri melainkan diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah.

2. Pelaksanaan Workshop dan Pelatihan Kebencanaan

Setelah kurikulum dan buku pintar kebencanaan disusun, selanjutnya dilakukan pelatihan dan workshop bagi Kepala

Sekolah dan Guru jenjang SMP. Setiap sekolah wajib mengirimkan satu (1) perwakilan guru atau staffnya untuk mengikuti pelatihan dan workshop yang diselenggarakan oleh Dindikpora dan BPBD Banjarnegara. Pelatihan dan workshop yang diikuti oleh guru SMP se-Kabupaten Banjarnegara ini dilaksanakan selama 3 hari dengan agenda mengupas buku pintar sekolah tangguh bencana. Pelatihan tersebut bertujuan untuk mengenalkan pendidikan kebencanaan bagi guru yang nantinya ilmu yang diperoleh ditularkan langsung ke siswanya. Materi yang diberikan pada saat pelatihan adalah pengenalan resiko bencana, cara evakuasi mandiri, cara menghadapi bencana, dan lain-lain. Disamping pemaparan materi berupa ceramah dan diskusi, ditengah materi juga diselingi simulasi kebencanaan.

Gambar 3.5
Workshop Kebencanaan bagi Guru SMP se-
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018



Sumber: BPBD Kabupaten Banjarnegara

Selain guru, kepala sekolah menengah pertama di Kabupaten Banjarnegara juga mengikuti seminar kebencanaan yang diadakan di Politeknik Banjarnegara, kegiatan tersebut terbuka untuk umum. Baik seminar maupun pelatihan dan workshop dilakukan agar warga sekolah terutama tenaga pendidik lebih paham akan pentingnya pengurangan resiko bencana di masyarakat dan dapat menularkan pengetahuan mengenai kebencanaan tersebut kepada khalayak ramai bukan hanya untuk diri sendiri.

Hasil penelitian di lapangan, tidak semua kepala sekolah ikut dalam seminar tersebut. 2 dari 4 sekolah menengah pertama telah mengikuti seminar kebencanaan tersebut, diantaranya Kepala SMP Negeri 1 Wanayasa dan Kepala SMP Negeri 1 Batur. Sisanya yakni Kepala SMP Negeri 1 Karangkoobar dan Kepala SMP Ma'arif NU 01 Karangkoobar mengaku tidak mengikuti seminar yang diadakan oleh Politeknik Banjarnegara dengan menggandeng BPBD dan Dindikpora Kabupaten Banjarnegara.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa workshop dan pelatihan bagi guru sudah terlaksana dengan baik dan telah diikuti oleh seluruh guru SMP di Kabupaten Banjarnegara. Sedangkan untuk seminar yang diselenggarakan untuk umum, Dindikpora mengundang seluruh kepala sekolah

SMP yang ada di wilayah Banjarnegara, namun hanya beberapa yang ikut serta.

3. Pencapaian Tujuan Pelaksanaan Program

Program pendidikan kebencanaan mempunyai tujuan untuk memberikan bekal pengetahuan terkait kebencanaan dan kesiapsiagaan bencana bagi pendidik dan peserta didik. Pemberian pengetahuan kebencanaan bagi sekolah berupa sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan. Guna mencapai tujuan program, maka perlu diterapkan target dan sasaran program yang dapat menjadi acuan pelaksanaan program/kegiatan. Berdasarkan hasil wawancara, tidak ada sasaran dan target secara khusus dibuat dalam program pendidikan kebencanaan. Namun, apabila dilihat secara langsung di lapangan, maka akan terlihat bahwa program pendidikan kebencanaan ini telah berjalan sesuai dengan tujuan program. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Andri Sulisty, SOR selaku Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Banjarnegara bahwa,

“pelaksanaan program pendidikan kebencanaan di sekolah telah sesuai dengan tujuan program. Dapat kita lihat pada semakin meningkatnya kesadaran dan kepedulian siswa maupun guru bahkan masyarakat luas akan pentingnya pengetahuan dasar kebencanaan. Saat ini sudah banyak yang relawan-relawan muda peduli kebencanaan”

Dengan semakin banyaknya pemuda-pemudi yang menjadi relawan kebencanaan, menunjukkan bahwa tujuan

program telah tercapai dengan baik. Para relawan muda ini sangat aktif untuk ikut serta dalam setiap kegiatan kebencanaan, baik ketika terjadi bencana maupun pada saat tidak terjadi bencana. Hal ini dapat dilihat dari antusiasme siswa sekolah dalam membantu korban bencana alam, tidak hanya bantuan berupa materiil namun juga bantuan tenaga.

Gambar 3.6
Penggalangan Dana oleh Siswa Sekolah di Wilayah
Banjarnegara



Sumber: Dokumentasi SMK Negeri 1 Wanayasa

Peserta didik SMP menunjukkan bentuk kepeduliannya terhadap bencana melalui penggalangan dana untuk membantu meringankan beban korban bencana. Penggalangan dana tersebut dilakukan di beberapa titik lampu merah di sekitar Alun-alun Kabupaten Banjarnegara. Dana yang terkumpul kemudian diberikan langsung kepada korban bencana apabila peristiwa bencana terjadi di dalam kota, sedangkan bencana yang terjadi di luar kota maka dikumpulkan kepada BPBD

Banjarnegara atau perantara lain, seperti melalui transfer ke rekening pihak swasta (stasiun televisi) untuk selanjutnya disalurkan kepada korban bencana. Selain mengumpulkan dana di luar sekolah, seperti di jalan-jalan, mereka juga melakukan penggalangan dana di sekolah. Di samping itu, para siswa juga melakukan pengumpulan dan pendistribusian bantuan logistik bagi korban bencana, baik untuk peristiwa bencana di dalam maupun luar kota Banjarnegara. Bantuan tersebut berupa pakaian layak pakai ataupun sembako.

Kegiatan pengumpulan dan pendistribusian logistik dilakukan untuk mengurangi penderitaan korban melalui pemerataan pendistribusian bantuan. Logistik memberikan layanan antara kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana dan juga memainkan peran penting dalam efektivitas dan tanggap darurat dalam hampir semua program bantuan kemanusiaan, seperti kesehatan, makanan, air, sanitasi, dan *shelter*. Hal ini menunjukkan kemampuan relawan muda bencana tidak perlu diragukan lagi. Di usianya yang masih muda, mereka sudah mampu membantu meringankan beban korban bencana melalui pendistribusian logistik yang mencukupi kebutuhan korban tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan program pendidikan kebencanaan pada jenjang sekolah menengah telah

sesuai dengan tujuan program. Program pendidikan kebencanaan terselenggara dengan baik dan efektif meski belum maksimal. Terlihat dari meningkatnya kesadaran pengetahuan peserta didik terkait mitigasi dan kesiapsiagaan bencana sehingga mereka paham bagaimana sikap dan tindakan yang harus dilakukan pada saat terjadinya bencana. Selain itu, saat ini sudah banyak generasi muda yang menjadi tertarik menjadi relawan kebencanaan bahkan mereka aktif di berbagai kegiatan kebencanaan yang diselenggarakan oleh BPBD Banjarnegara.

3.1.4 Dampak Program Pendidikan Kebencanaan

Sebuah program tentu memiliki dampak dalam hal pelaksanaannya. Dampak merupakan suatu perubahan yang dipengaruhi akibat adanya suatu aktivitas atau tindakan sebagai bentuk konsekuensi dari pelaksanaan sebuah kebijakan/program sehingga akan membawa perubahan positif maupun negatif. Dampak yang ditimbulkan dalam implementasi sebuah program akan menjadi pertimbangan dalam penentuan kebijakan selanjutnya.

1. Pengaruh Pelaksanaan Program Pendidikan Kebencanaan Jangka Pendek

Pengaruh merupakan suatu keadaan adanya hubungan timbal balik antara yang mempengaruhi dengan yang dipengaruhi.

Penerapan pendidikan kebencanaan pada SMP di Banjarnegara berdampak cukup signifikan bagi perkembangan pengetahuan peserta didik terkait kebencanaan.

Tabel 3.3
Bencana di Kabupaten Banjarnegara

No.	Jenis Bencana	Tanggal	Lokasi	Korban
1.	Tanah Longsor	4 Januari 2006	Dusun Gunungraja, Desa Sijeruk, Kec. Banjarmangu	90 jiwa meninggal dunia, 16 orang luka ringan.
2.	Tanah Longsor	12 Desember 2014	Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kec. Karangkoobar	108 orang meninggal dunia, 125 orang belum ditemukan.
3.	Tanah Gerak	8 Januari 2018	Desa Bantar, Kec. Wanayasa	Tidak ada korban jiwa.
4.	Gempa Bumi	18 April 2018	Desa Kasinoman, Kertosari dan Plorengan Kec. Kalibening	27 jiwa luka ringan, 2 jiwa meninggal dunia.

Sumber: data diolah dari berbagai sumber.

Berdasarkan tabel di atas, sudah banyak peristiwa bencana yang terjadi di wilayah Banjarnegara, bahkan sebagian besar diantaranya berada di sekitar lingkungan sekolah. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peristiwa gempa bumi di Desa Kertosari, Kecamatan Kalibening yang mana SMP Negeri 2 Kalibening merupakan sekolah yang terdampak akibat bencana tersebut. Selain itu, masih cukup tingginya korban jiwa akibat peristiwa bencana mengindikasikan bahwa masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengetahuan dasar terkait

kebencanaan. Kendati demikian, dapat dilihat bahwa terdapat penurunan angka korban jiwa akibat bencana yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap kebencanaan.

Hal ini ditandai dengan antusiasme peserta didik ketika penyelenggaraan sosialisasi maupun simulasi mengenai pendidikan kebencanaan di sekolah-sekolah yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Banjarnegara. Simulasi yang dilakukan berupa simulasi terjadinya gempa dan cara menghadapinya, pertolongan pertama pada saat evakuasi korban, bagaimana cara evakuasi diri sendiri maupun orang lain ketika terjadinya bencana. Bertambahnya wawasan dan pemahaman serta antusiasme peserta didik dalam mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan mitigasi bencana merupakan salah satu bentuk pengaruh dari pelaksanaan pendidikan kebencanaan dalam jangka pendek. Bapak Hari Teguh Wibowo, S.Pd selaku Kepala SMP Negeri 1 Batur menyampaikan bahwa:

“Pada saat sosialisasi maupun simulasi siswa di sini antusias sekali mbak, apalagi ketika simulasi. Mereka jadi lebih memahami materi yang disampaikan”

Pengaruh dari penerapan muatan lokal kebencanaan pada jenjang SMP juga disampaikan oleh Bapak Sutrimo, S.Pd selaku Guru SMP Negeri 1 Karangkoobar bahwa:

“Semenjak mulok kebencanaan diterapkan di sekolah ini, siswa jadi lebih paham tentang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaruh jangka pendek dari penerapan pendidikan kebencanaan di sekolah berupa adanya antusiasme siswa dalam mengikuti sosialisasi maupun simulasi serta bertambahnya pengetahuan dan wawasan siswa terkait mitigasi bencana dengan harapan dapat meminimalisir dampak resiko bencana.

2. Pengaruh Pelaksanaan Program Pendidikan Kebencanaan Jangka Panjang

Pendidikan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) merupakan sebuah kegiatan jangka panjang dan bagian dari pembangunan berkelanjutan. Kegiatan mitigasi bencana yang dilakukan dalam tataran pendidikan di sekolah meliputi edukasi atau penyusunan kurikulum kebencanaan serta melakukan simulasi secara kontinyu guna meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dampak yang ditimbulkan akibat implementasi program pendidikan kebencanaan jangka panjang dapat dilihat dari semakin banyaknya generasi muda yang sudah memiliki minat untuk menjadi relawan kebencanaan. Tidak hanya bantuan berupa finansial, namun juga berupa bantuan tenaga.

Hingga kini, semakin banyak relawan muda yang berpartisipasi dalam kegiatan penanggulangan bencana. Relawan

memiliki peran yang amat penting, baik dalam hal melakukan pengalangan dana, mengumpulkan bantuan logistik, maupun terjun langsung ke lokasi bencana untuk membantu evakuasi korban dan membantu membersihkan puing-puing bangunan.

“saat ini semakin banyak yang usianya masih muda, namun sudah memiliki minat untuk menjadi relawan kebencanaan, melalui pramuka, PMR, maupun OSIS. Tidak hanya membantu dalam bentuk anggaran tetapi juga bantuan tenaga” (hasil wawancara dengan Bapak Agus Haryono, S.Sos, Kasi Perlengkapan dan Logistik BPBD Banjarnegara, Januari 2019)

Penerapan program pendidikan kebencanaan memberikan dampak yang positif secara jangka panjang terutama bagi peserta didik. Pengaruh dari program tersebut menjadikan siswa lebih mandiri, menguasai ilmu kebencanaan yang sebelumnya dianggap tidak begitu penting, menumbuhkan dan meningkatkan empati siswa (rasa tolong-menolong), dan meningkatkan kerjasama antarindividu atau kelompok. Bapak Tri, menjelaskan bahwa:

“saya rasa pendidikan kebencanaan ini sangat memberikan efek positif. Siswa menjadi lebih mandiri, menguasai ilmu kebencanaan, meningkatkan kerjasama dan melatih rasa tolong-menolong terhadap sesama” (hasil wawancara dengan Bapak Sutrimo, S.Pd, Guru SMP Negeri 1 Karangobar, 24 Januari 2019)

Dapat diambil kesimpulan bahwa, pengaruh jangka panjang penerapan pendidikan kebencanaan yang diterapkan di SMP memiliki pengaruh positif bagi peserta didik. Peserta didik menjadi lebih peduli akan pentingnya pendidikan kebencanaan sejak dini dengan bergabung menjadi sukarelawan bencana.

3.1.5 Keberlanjutan Program Pendidikan Kebencanaan

Keberlanjutan mempunyai makna suatu program yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan. Program yang berkelanjutan diperlukan agar sebuah program dapat berhasil mempertahankan kualitasnya. Pemerintah dalam hal ini Dindikpora dan BPBD juga mempertimbangkan keberlanjutan sebuah program, yang mana program pendidikan kebencanaan ini akan dilaksanakan secara berkesinambungan dengan didukung pengembangan inovasi sehingga meningkatkan antusiasme peserta didik dalam mempelajari setiap materi yang diberikan. Keberlanjutan program pendidikan kebencanaan sangat penting terutama mengingat banyaknya sekolah yang berada di daerah yang rawan bencana. Program ini diharapkan mampu membuka kesadaran masyarakat terutama di dunia pendidikan sehingga resiko bencana dapat diminimalisir. Keberlanjutan program pendidikan kebencanaan pada jenjang sekolah menengah di Banjarnegara dapat dilihat dari (1) adanya permintaan dari sekolah untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan secara kontinu terkait pendidikan kebencanaan, dan (2) adanya inovasi pendidikan kebencanaan agar pelaksanaan program pendidikan kebencanaan di sekolah dapat terus berkembang dan variatif.

1. Permintaan Sosialisasi dan Pendampingan Pendidikan Kebencanaan dari Sekolah

Permintaan merupakan suatu bentuk keinginan yang ingin dipenuhi. Dalam sistem monitoring dan evaluasi, permintaan sangat penting untuk menunjang keberlanjutan pelaksanaan sebuah program maupun kegiatan. Permintaan harus bersifat kontinu, apabila permintaan bersifat episodik atau acak, maka sistem monitoring dan evaluasi berbasis hasil tidak akan digunakan dan dipertahankan. Persyaratan terstruktur dalam hasil pelaporan, termasuk regulasi, dapat membantu mengarahkan pada permintaan yang berkelanjutan dan konsisten untuk sistem tersebut. Permintaan dapat dirangsang ketika tujuan strategis pemerintah diterjemahkan ke dalam sistem evaluasi berbasis hasil, seperti strategi pengurangan resiko bencana bagi masyarakat.

Dari hasil wawancara, sejak awal peluncuran dan pengenalan program pendidikan kebencanaan di sekolah, BPBD Banjarnegara selalu mendapatkan permintaan dari sekolah-sekolah di wilayah Banjarnegara baik di daerah atas maupun daerah kota untuk melakukan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan bagi guru maupun siswa.

*“permintaan untuk sosialisasi maupun pendampingan itu selalu ada. Bahkan kemarin SMA Punggelan minta kami untuk melakukan pendampingan sekolah tangguh bencana”
(hasil wawancara dengan Bapak Andri Sulistyono, SOR., Kasi*

Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Banjarnegara, 21 Januari 2019)

Pelatihan tanggap bencana bagi guru SMP diselenggarakan di Aula Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara. Setelah guru-guru SMP melakukan pelatihan yang difasilitasi oleh Dindikpora dan BPBD Banjarnegara, selanjutnya banyak sekolah yang meminta untuk diberi sosialisasi, pelatihan dan pendampingan kebencanaan di sekolah agar pengetahuan terkait kebencanaan tidak hanya diterima oleh guru akan tetapi juga peserta didik. Pelatihan atau sosialisasi tersebut berupa pengenalan resiko bencana, penjabaran riwayat bencana di sekitar lingkungan sekolah, proses evakuasi, penanggulangan dan penanganan ketika terjadi bencana, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk pendampingan, kegiatan diselenggarakan secara fleksibel melalui pembelajaran bagi warga sekolah dengan konten mitigasi bencana atau pengurangan resiko bencana secara umum agar meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tangguh bencana bagi seluruh warga sekolah. Sosialisasi dan pendampingan yang dilaksanakan oleh BPBD Banjarnegara belum terlaksana secara optimal.

*“kami selalu berusaha melakukan sosialisasi dan pendampingan bagi sekolah-sekolah yang ada di Banjarnegara, namun belum terlaksana secara maksimal”
(hasil wawancara dengan Bapak Andri Sulistyono, SOR, Kasi*

Pencegahan dan Kespasiagaan BPBD Banjarnegara, 21 Januari 2019)

Mengenai permintaan sosialisasi dan pendampingan di sekolah juga disampaikan oleh Bapak Akhmad Supriyadi, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wanayasa, sebagai berikut:

“iya mbak, itu permintaan dari kami. Kemarin kami mengundang BPBD Banjarnegara untuk melakukan sosialisasi dan juga simulasi kebencanaan pada saat MOS”

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Bapak Sutrimo, S.Pd selaku Guru SMP Negeri 1 Wanayasa bahwa,

“kami yang meminta BPBD untuk datang mengisi sosialisasi kebencanaan pada saat MOS, selain penyampaian materi juga diadakan simulasi agar siswa lebih menjiwai materi yang telah dipaparkan”

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diambil kesimpulan bahwa permintaan sosialisasi dan pendampingan merupakan inisiatif dari sekolah yang kemudian ditindaklanjuti oleh BPBD. Hal tersebut sebagai bentuk kesadaran dan kepedulian pihak sekolah akan pentingnya wawasan kebencanaan sejak dini.

2. Inovasi Program Pendidikan Kebencanaan

Inovasi merupakan sebuah ide atau gagasan yang diterima oleh seseorang atau sekelompok orang sebagai hal baru atau berbeda sebagai bentuk pengembangan dari program/kegiatan sebelumnya. Program pendidikan

kebencanaan pada jenjang sekolah menengah selalu dilakukan pengembangan agar lebih variatif dan edukatif. Inovasi yang dilakukan salah satunya berupa pembuatan sekolah sungai yang mana melibatkan relawan sungai untuk mengadakan sekolah sungai agar terjadi regenerasi dengan memberikan bekal pengetahuan kebencanaan dari segi lain.

“kami selalu mengembangkan pendidikan kebencanaan dengan cara melakukan inovasi-inovasi baru agar terjadi regenerasi sehingga anak-anak tidak bosan dengan materi yang ada. Salah satu inovasi yang tengah dikembangkan yaitu berupa sekolah sungai dengan melibatkan berbagai unsur, baik pendidikan, masyarakat, pramuka, hingga unsur pemerintah” (hasil wawancara dengan Bapak Agus Haryono, S.Sos, Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Banjarnegara, Januari 2019)

Bapak Agus menambahkan, kegiatan yang dilakukan sekolah sungai yakni, berupa pembersihan sungai dan penanaman pohon yang diikuti oleh, Destana, perwakilan Dindikpora, perwakilan TNI dan Polisi, penggiat sungai, siswa-siswi SMP sederajat, dan siswa SMA/SMK sederajat yang salah satunya merupakan perwakilan Tim Tangguh Bencana Sekolah/Madrasah Aman Bencana. Gerakan sekolah sungai tersebut sudah di mulai sejak bulan Oktober 2018 lalu, sebelumnya telah dilaksanakan rapat koordinasi lintas komunitas, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan pihak terkait dengan membahas gerakan sekolah sungai ini. Kegiatan tersebut memiliki tujuan untuk melestarikan lingkungan dan

sebagai bentuk upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana banjir ketika musim penghujan tiba. Kegiatan yang dilakukan berupa workshop, aksi bersih sungai bersama 1000 sukarelawan, penanaman pohon di tepi sungai, dan penebaran benih ikan di sungai (SW, 2018).

“Gerakan sekolah sungai ini sebagai bentuk pengkampanyean pentingnya melestarikan sungai. Pohon yang ditanam diharapkan dipelihara oleh masyarakat agar tumbuh besar sehingga mampu menahan erosi dan mencegah longsor.” (hasil wawancara Bapak Andri Sulisty, SOR, Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Banjarnegara dalam suaramerdeka.com, 13 September 2018)

Gerakan sungai ini juga bertujuan untuk memperindah tampilan sungai sehingga bisa dijadikan sebagai destinasi wisata, seperti yang telah dilakukan oleh sejumlah desa wisata yang memanfaatkan sungai untuk pariwisata. Selain dapat dijadikan destinasi wisata, kondisi sungai yang bersih dan terawat akan memberikan manfaat untuk pengairan, baik untuk sawah maupun budidaya ikan, sumber air minum warga. Saat ini, banyak perusahaan air minum daerah yang memanfaatkan air dari sungai sebagai sumber mata air untuk kemudian di olah (SW, 2018).

Dapat disimpulkan bahwa, BPBD Banjarnegara selalu membuat inovasi terkait pelaksanaan program pendidikan kebencanaan salah satunya yakni sekolah sungai ini. Gerakan sekolah sungai dianggap efektif untuk dilaksanakan, bukan hanya

untuk memperindah tampilan sungai akan tetapi juga sebagai upaya pencegahan dan pengurangan resiko bencana banjir.

3.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Evaluasi Program Pendidikan Kebencanaan

Proses evaluasi program pendidikan kebencanaan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor sehingga perencanaan maupun pelaksanaannya tidak berjalan secara optimal. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi evaluasi program tersebut, yakni internal dan eksternal.

3.2.1. Faktor Internal

Keterbatasan SDM yang dimiliki oleh Dindikpora maupun BPBD Kabupaten Banjarnegara menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi proses evaluasi program pendidikan kebencanaan. Keterbatasan SDM di bidang kebencanaan mempengaruhi ketercapaian kegiatan pendidikan kebencanaan di sekolah menengah, seperti sosialisasi atau diklat bagi guru dan siswa SMP. Sosialisasi di sekolah-sekolah yang dilakukan oleh BPBD baru sekitar 10% atau sekitar 14 sekolah yang berhasil dilaksanakan sosialisasi. Bapak Andri Sulisty, SOR selaku Kasi Pencegahan dan Keisapsiagaan BPBD Banjarnegara menyampaikan bahwa:

“salah satu kendala kami adalah SDM yang terbatas dan waktu yang juga terbatas. BPBD kekurangan personel sehingga sampai saat ini belum semua sekolah kami datangi untuk melihat bagaimana perkembangan pelaksanaan program pendidikan di sekolah. Kami datang apabila ada permintaan dari pihak sekolah, pada saat itulah kami menanyakan perkembangan program tersebut”

Sudah jelas dikatakan bahwa BPBD Kabupaten Banjarnegara selaku pihak yang paham dan merupakan orang lapangan terkait kebencanaan masih memiliki kendala dalam hal ketersediaan personel. Jumlah personel yang dimiliki oleh BPBD Banjarnegara belum memadai mengingat tingkat intensitas bencana di Banjarnegara tidak sebanding dengan jumlah personel yang ada. Secara *de jure*, tipe instansi BPBD ini adalah tipe B. Namun, apabila dilihat dari intensitas bencana yang ada, seharusnya tipe organisasi BPBD Banjarnegara adalah tipe A demi efektivitas koordinasi mengingat penanggulangan bencana butuh koordinasi dengan cepat. Keterbatasan SDM ini juga terlihat dari masih kewalahannya pihak BPBD dalam menanggapi permintaan sosialisasi dan pendampingan.

3.2.2. Faktor Eksternal

Keterbatasan anggaran berkaitan dengan alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Anggaran program pendidikan kebencanaan berasal dari APBD yang jumlahnya terbatas, sedangkan kegiatan yang ada dapat dikatakan banyak. Tidak adanya anggaran khusus yang diberikan untuk program pendidikan kebencanaan, seperti yang disampaikan oleh Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Banjarnegara, sebagai berikut:

“kendala yang kedua yaitu berupa keterbatasan anggaran. Saat ini APBD yang diterima oleh BPBD malah

turun. Belum ada anggaran khusus yang dialokasikan untuk program pendidikan kebencanaan. Kalau untuk penanganan bencana kami mendapat bantuan dari berbagai pihak, tapi untuk pendidikan kebencanaan ini kami tidak mendapat bantuan dari mana pun”

Dari pernyataan di atas, permasalahan terkait keterbatasan anggaran menjadi masalah serius, karena apabila alokasi anggaran yang diperoleh minim, maka akan menghambat aktivitas dan kegiatan program pendidikan kebencanaan di sekolah menengah sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat berjalan dengan optimal. Hal tersebut diperlukan komunikasi dan kerjasama yang baik dari Pemerintah Kabupaten Banjarnegara selaku pembina program pendidikan kebencanaan terhadap Dindikpora dan BPBD Kabupaten Banjarnegara selaku pelaksana program.